

REPRESENTASI KEKUASAAN DALAM WACANA POLITIK (KAJIAN ETNOGRAFI KOMUNIKASI)

Oleh: Yunidar Nur

ABSTRAK

Analisis wacana (discourse analysis) mengenai representasi kekuasaan anggota DPRD dalam menjalankan peran dan fungsi politiknya, merupakan sebuah konteks wacana politik yang proses interaksinya tidak terlepas dari penggunaan jenis-jenis kekuasaan. Wujud kekuasaan akan tampak dari satuan dasar wacana politiknya, yakni tindak tutur. Tindak tutur yang digunakan dalam wacana politik untuk merepresentasikan kekuasaan dapat berbentuk direktif, ekspresif, komisif, atau deklaratif. Dari tindak tutur tersebut akan teridentifikasi jenis-jenis kekuasaan, seperti; kekuasaan paksaan (coercive power), kekuasaan absah (legitimate power), kekuasaan hadiah (reward power), dan kekuasaan keahlian (expert power), melalui strategi dan pola percakapan yang khas digunakan. Selain itu, fungsi kekuasaan melalui perspektif struktural-fungsional dalam fungsi suportif, fungsi prefentif, dan fungsi korektif di dalam konteks ini juga akan terlihat dengan jelas. Studi ini akan mengamati dengan cermat tiga komponen tutur yang digunakan untuk merepresentasikan kekuasaan dalam wacana politik, yaitu; (1) partisipan, (2) tujuan tutur, dan (3) topik tuturan.

Kata Kunci: *Representasi – Kekuasaan – Wacana Politik*

I. PENDAHULUAN

Unit komunikasi bahasa tidak hanya didukung oleh kalimat, tetapi juga produksi kalimat yang menunjukkan tindak tutur. Menurut Austin (1978:16) bahwa semua komunikasi bahasa melibatkan tindak tutur, dan produksi kalimat yang berada pada kondisi-kondisi tertentu merupakan tindak tutur yang unik. Demikian pula halnya dengan kekuasaan dalam pelbagai wacana direpresentasikan menggunakan tindak tutur yang unik dan kontekstual.

Melalui tindak tutur dan penggunaan strategi bertutur, sebuah wujud kekuasaan dapat diamati dan digambarkan secara konkrit. Identifikasi bentuk-bentuk kekuasaan juga akan dapat tergambar dengan jelas beserta fungsi-fungsinya. Tindak tutur direktif, ekspresif, deklaratif, dan komisif merupakan proses komunikasi interaksi yang di dalamnya terdapat giliran tutur dan pengendalian topik pembicaraan sebagai salah satu strategi. Dengan menggunakan perspektif struktural-fungsional, fungsi-fungsi kekuasaan baik prefentif, suportif, maupun korektif dapat digambarkan secara sistematis.

Penggunaan kekuasaan dalam wacana politik di DPRD direpresentasikan dengan strategi yang berhubungan dengan konteks. Dengan demikian, maka pola-pola pengambilan giliran tutur (*turn-taking*), pola pengendalian topik, dan pola interupsi, terkait dengan strategi penggunaan kekuasaan. Dalam konteks wacana apapun, termasuk wacana politik di DPRD, penggunaan kekuasaan mempunyai fungsi-fungsi tertentu. Dalam konteks ini, fungsi kekuasaan terkait dengan pencapaian tujuan-tujuan (tujuan partai, kelompok, atau pribadi), mencegah sikap dan perilaku tertentu, atau memberikan pengukuran terhadap tujuan yang ditargetkan, serta yang tidak kalah pentingnya adalah mewujudkan iklim politik yang demokratis (bandingkan dengan Froyen, 1993:59-60).

Salah satu fungsi bahasa yang khusus selain sebagai alat komunikasi adalah sebagai sarana politik. Aliran pemikiran postmodernisme menganggap bahwa fungsi ini justru dianggap menonjol. Menurut Habermas (dalam: Latif dan Ibrahim, 1996:16) bahwa proses-proses sosial tidak hanya beranyamkan praksis kerja, tetapi juga praksis komunikasi. Dalam hubungan itu, penggunaan kekuasaan tidak hanya terbatas pada pengendalian sarana teknis dan produksi sosial, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah upaya-upaya memanipulasi sistem produksi ideasional. Habermas berkesimpulan bahwa ternyata bahasa merupakan sarana kekuasaan

Studi representasi kekuasaan dalam wacana politik ini, akan mengetengahkan pendekatan kekuasaan dalam wacana politik, hakekat wacana sebagai tuturan, representasi kekuasaan dalam ancangan etnografi komunikasi.

II. Kekuasaan dalam Wacana Politik

Sudut pandang tentang kekuasaan seringkali dilihat dalam fungsi dominatif dan humanis. Perbedaan sudut pandang akan menghasilkan penjelasan tentang kekuasaan yang berbeda pula. Pandangan dominatif biasanya menjelaskan kekuasaan sebagai sesuatu yang cenderung represif. Sebaliknya, pandangan yang humanis menjelaskan kekuasaan sebagai sesuatu yang konstruktif.

Pemikiran tentang hakikat kekuasaan yang cenderung represif datang dari Max Weber dan beberapa orang pengikutnya. Weber menyatakan bahwa kekuasaan merupakan kemungkinan pemaksaan seseorang atas perilaku orang lain, termasuk para oposan yang berlawanan haluan. Sejalan dengan pemikiran Weber, Bachrach dan Baratz (dalam: Stone, 1986:79) menyatakan bahwa kekuasaan menentukan orang lain untuk menurut. Pemikiran tersebut mengisyaratkan bahwa kekuasaan mengandung unsur pemaksaan dimana orang lain harus menuruti. Sedangkan hakikat kekuasaan yang cenderung konstruktif diartikan sebagai sebuah pengaruh potensial seseorang terhadap sikap dan perilaku orang lain (periksa: Yulk, 1998:165; dan Robbins, dkk., 1994:521). Dengan demikian, maka karakteristik dasar kekuasaan merupakan sebuah potensi yang dimiliki seseorang/kelompok, dan potensi itu berbentuk pengaruh, serta pengaruh itu bisa bersifat positif atau negatif.

Menurut Andersen (2000:44-46) bahwa kekuasaan mempunyai empat karakteristik dasar. *Pertama*, kekuasaan adalah kata abstrak yang biasa digunakan untuk memaparkan hubungan-hubungan. *Kedua*, sumber kekuasaan adalah heterogen yang dapat dianggap sebagai akibat dari, atau diturunkan dari, pola-pola perilaku dan hubungan-hubungan sosial tertentu. *Ketiga*, penumpukan kekuasaan tak memiliki batasan inherent, karena memaparkan hubungan tertentu antar manusia, kekuasaan pada dasarnya tak terbatas. *Keempat*, kekuasaan secara moral ambigu yang diperkuat oleh pandangan bahwa kekuasaan diturunkan dari sumber-sumber heterogen. Dari karakteristik dasar kekuasaan itu, lebih lanjut mengarahkan akan adanya jenis-jenis kekuasaan. Lee (2002:29) membagi kekuasaan atas tiga jenis, yakni; (1) kekuasaan yang dibangun atas paksaan, (2) kekuasaan yang dibangun atas manfaat, dan (3) kekuasaan yang dibangun atas prinsip kehormatan. Pengelompokan kekuasaan menurut jenisnya yang banyak dirujuk sampai saat ini datang dari Frech dan Rawen yang membedakan kekuasaan atas lima jenis, yaitu; (1) coercive power atau kekuasaan paksaan, (2) legitimate power atau kekuasaan absah, (3) reward power atau kekuasaan hadiah, (4) expert power atau kekuasaan ahli, dan (5) referent power atau kekuasaan acuan (periksa: Robinson, dkk., 1994; Gibson, 1996; Yulk, 1998).

Penelitian tentang representasi kekuasaan yang dikaitkan dengan dominasi jender pernah dilakukan oleh sejumlah peneliti, antara lain Grimmell (1998), Charly (1999), dan Swarzwald (2001). Hasil ketiga penelitian tersebut menjelaskan bahwa laki-laki cenderung beragam di dalam menggunakan kekuasaan, sedangkan wanita lebih terbatas. Argumentasi ketiga peneliti hampir sama, yakni aktivitas laki-laki jauh lebih banyak dan beragam dibanding perempuan, sehingga penerapan

kekuasaan di dalam pelbagai wacana lebih banyak dilakukan oleh laki-laki dibanding perempuan.

Representasi kekuasaan di perusahaan yang berfokus pada reaksi karyawan, juga telah diteliti oleh Mossholder (1998) dan Fedor (2001). Mossholder menemukan bahwa penggunaan jenis kekuasaan kepakaran, kekuasaan hadiah, kekuasaan absah, dan kekuasaan acuan berkorelasi secara positif dengan komitmen karyawan dan kepuasan kerja. Penelitian Fedor juga menunjukkan hasil yang kurang lebih sama, yakni penggunaan kekuasaan kepakaran dan kekuasaan acuan berkorelasi positif dengan usaha peningkatan reaksi positif karyawan. Sedangkan penggunaan kekuasaan paksaan tidak demikian, atau tidak berkorelasi secara positif.

Penelitian yang lain telah pula dilakukan oleh Thansoulas (2001) yang menemukan bahwa melalui struktur interkasi, struktur giliran tutur, dan tindak tutur yang digunakan oleh guru-siswa, tampak bahwa guru menggunakan kekuasaannya untuk mendominasi siswa. Representasinya terlihat pada tuturan guru yang selalu mengontrol perilaku siswa. Guru merasa otoriter dan mayor sementara siswa dianggap pihak minor. Guru menyiapkan apa saja, dan siswa dianggap sekumpulan orang-orang yang tidak tahu apa-apa.

Wacana politik praktis di Indonesia khususnya di kalangan legislatif dewasa ini telah sangat jauh berbeda dibanding masa sebelumnya, terutama pada masa Orde Baru. Undang-undang Otonomi Daerah yang telah mengalami dua kali perubahan, tampak semakin menguatkan eksistensi kekuasaan legislatif atau DPRD sebagai lembaga kontrol, yang sebelumnya secara fungsional berada di bawah dominasi kekuasaan eksekutif.

Tulisan ini tidak hendak mewacanakan politik praktis yang bersifat dinamis atau percaturan dan kalkulasi politik dalam suatu arena perebutan kekuasaan, melainkan pembahasan tindak tutur yang merepresentasikan kekuasaan secara kontekstual melalui interaksi dalam wacana politik. Istilah ‘*wacana*’ pertamakali di populerkan oleh Harris pada tahun 1951 dengan memperkenalkan istilah ‘*discourse analysis*’. Kini istilah tersebut telah mengalami perkembangan dan penggunaannya sangat luas (periksa: Schiffrin, 1994:24). Pengertian wacana tidak terlepas dari perkembangan aliran linguistik yang didasarkan atas pandangan struktural, fungsional, dan struktural-fungsional. Analisis wacana sebagai penggunaan bahasa tidak dapat dilepaskan dari tujuan dan fungsi bahasa dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam wacana politik. Menurut Fasold (1990:65) bahwa kajian wacana merupakan kajian tentang beragam aspek penggunaan bahasa. Pandangan yang lebih mengkhusus dikemukakan oleh Brown dan Yule (1996:1) yang menyatakan bahwa analisis wacana merupakan analisis atas bahasa yang digunakan. Dengan demikian, maka

kekuasaan dalam wacana politik, dalam hal ini kekuasaan yang tercermin melalui *uttarance* (tuturan) fungsional, merupakan kekuasaan yang ada dan dimiliki oleh masing-masing anggota DPRD sebagai legislatif.

III. Hakikat Wacana sebagai Tuturan

Pada hakikatnya wacana percakapan adalah wacana yang berisi komunikasi bersemuka (dua arah). Untuk apa komunikasi itu dilakukan dan dengan piranti apa tujuan-tujuan itu diwujudkan? Lane (dalam: Richard, 1995:6) mengemukakan beberapa hal tentang tujuan percakapan, yaitu; sebagai pertukaran informasi, memelihara tali persahabatan sosial dan kekerabatan, negosiasi kepentingan, dan pengambilan keputusan, serta pelaksanaan tindak bersama. Pertukaran informasi, negosiasi kepentingan, dan pengambilan keputusan, serta pelaksanaan tindak bersama, merupakan tujuan percakapan yang banyak dilakukan di dalam wacana politik di DPRD. Tujuan-tujuan itu hanya dapat diwujudkan melalui tindak tutur. Secara terminologis, tindak tutur diartikan sebagai unit terkecil dari aktivitas bertutur yang memiliki fungsi (periksa: Richard, 1995:6).

Fungsi tindak tutur terkait dengan alat penyampai pesan. Menurut Van Ek (dalam: Hatch, 1992:131-132) ada enam fungsi tindak tutur; (1) tukar-menukar informasi faktual, misalnya untuk mengidentifikasi, bertanya, melaporkan, dan mengatakan, (2) mengungkapkan informasi intelektual, misalnya setuju/tidak setuju, tahu/tidak tahu, dan ingat/tidak ingat, (3) mengungkapkan sikap emosi, misalnya berminat/tidak berminat, heran/tidak heran, takut, cemas, dan simpati, (4) mengungkapkan sikap moral, misalnya meminta maaf/memberi maaf, setuju/tidak setuju, menyesal, acuh, (5) meyakinkan/mempengaruhi, misalnya menyarankan, menasihati, memberi peringatan, dan (6) sosialisasi, misalnya memperkenalkan, menarik perhatian dan menyapa. Perkembangan teori tindak tutur untuk kebutuhan ilmiah praktis dan teoretis pada umumnya banyak mengacu pada teori Searle yang membagi tindak tutur menjadi lima jenis, yaitu; (1) *asertif*, (2) *direktif*, (3) *komisif*, (4) *ekspresif*, dan (5) *deklaratif* (periksa: Levinson, 1985:240).

Kelima jenis tindak tutur itu banyak berhubungan dengan komunikasi dan interaksi dalam tugas-tugas legislatif dalam wacana politik di DPRD. Tetapi salah satu atau beberapa diantaranya akan ada yang dominan, bergantung dinamika yang terjadi. Tindak tutur asertif atau disebut juga representatif merupakan ilokusi yang menyatakan suatu kebenaran, perasaan, dan sikap terhadap sesuatu keadaan.

Tindak tutur direktif adalah tindak tutur yang dirancang oleh penutur (P) untuk mempengaruhi atau bahkan mendominasi perasaan,

pikiran, dan perilaku petutur (T). Dengan demikian, tindak tutur direktif bertujuan untuk menghasilkan suatu efek berupa tindakan yang dilakukan oleh T (Leech, 1996:163).

Tindak tutur komisif merupakan ilokusi yang berfungsi menjanjikan sebuah pengharapan sebagai akibat dari sesuatu yang telah dilakukan. Ilokusi ini mengikat penutur untuk mewujudkan sesuatu dan cenderung menyenangkan karena menjanjikan sesuatu kepada petutur.

Tindak tutur ekspresif menurut Sealre (2001:87) adalah pengungkapan keadaan psikologis yang ditetapkan oleh kondisi yang dapat mempunyai muatan bermacam-macam. Secara ekspresif P akan mengucapkan terimakasih, selamat, belasungkawa, menyesalkan, dan mengecam T melalui komunikasi dan interaksi dalam konteks wacana politik sebagaimana fungsi yang diembannya. Lebih lanjut menurut Searle bahwa dalam tindak tutur ekspresif acapkali tidak memiliki arah kesesuaian, maksudnya bahwa dalam melakukan bentuk ekspresif penutur tidak berusaha mendapatkan fakta yang sesuai dengan kata-kata atau kata-kata yang sesuai dengan fakta, tetapi memiliki anggapan tentang adanya suatu proposisi yang diekspresikan.

Sedangkan tindak tutur deklaratif merupakan sebuah ilokusi yang jika diucapkan akan menyebabkan terciptanya suatu kondisi baru. Ilokusi dalam tindak tutur deklaratif ini akan menyebabkan perubahan-perubahan faktual dalam sebuah wacana tertentu.

III. Representasi Kekuasaan dalam Ancangan Etnografi Komunikasi

Perilaku penggunaan kekuasaan dalam berbagai konteks melalui proses komunikasi, menggunakan bahasa sebagai sarana utama dan di dalamnya terdapat komponen tutur yang sangat besar peranannya. Representasi kekuasaan mensyaratkan adanya tautan konteks terjadinya perilaku itu. Dalam kaitan inilah sehingga penelitian representasi kekuasaan dalam berbagai wacana tidak dapat dilepaskan dengan komponen tutur, termasuk wacana politik.

Penelitian etnografi komunikasi menurut Schiffirin (1994:137) adalah suatu ancangan terhadap wacana yang didasari oleh bidang antropologi dan linguistik. Ancangan ini mengakui adanya keragaman kemungkinan dan kebiasaan-kebiasaan komunikasi (relativitas budaya), dan fakta masing-masing kebiasaan merupakan bagian terintegrasi dengan hal yang diketahui dan dilakukan oleh peserta tutur sebagai anggota suatu budaya tertentu.

Menurut Gerry Phillipen (dalam: Littlejohn, 1992:227) bahwa terdapat empat asumsi di dalam etnografi komunikasi. *Pertama*, peserta dalam suatu masyarakat budaya lokal menciptakan makna bersama. *Kedua*, komunikasi dalam kelompok budaya apapun harus mengkoordinasikan tindakan-tindakannya. *Ketiga*, makna dan tindakan sangatlah khusus bagi kelompok-kelompok individu. *Keempat*, setiap masyarakat budaya memiliki seperangkat sumberdaya yang berbeda untuk memahami atau menetapkan makna pada tindakan-tindakannya. Adalah antropolog Dell Hymes yang pertama kali memperkenalkan ancangan penelitian etnografi komunikasi (*ethnography of Communication*) sebagai hasil pengembangan dari *ethnography of speaking* atau etnografi bertutur.

Model peristiwa tutur Hymes yang ia susun menggunakan sederet huruf agar mudah diingat yang dikenal dengan *Model SPEAKING* (Hymes, 1974:10 dan 53-62). Menurut Duranti (2002:288-289) bahwa inovasi sesungguhnya dalam *model SPEAKING* (*Setting and scene, Participants, Ends, Act sequence, Key, Norms of interaction and interpretation, Genre*) terletak pada hakikat satuan analisisnya yang ditunjang oleh (a) metode etnografi, (b) kajian peristiwa komunikatif yang menyusun kehidupan sosial masyarakat, dan (c) model komponen-komponen yang berbeda dari peristiwa-peristiwa.

Kerangka kerja etnografi komunikasi Hymes menawarkan paradigma deskripsi dan eksplanasi terhadap berbagai cara bertutur yang berbeda-beda di dalam masyarakat tutur. Ada tiga unit analisis yang ditonjolkan, yakni (a) situasi tutur, (b) peristiwa tutur, dan (c) komponen tutur. Situasi tutur merupakan konteks terjadinya komunikasi yang akan membedakan situasi tutur misalnya di; mesjid, keluarga, terminal, pesta perkawinan, atau di parlemen. Sedangkan peristiwa tutur mengacu kepada P dan T dalam suatu topik tuturan di dalam waktu, tempat, dan situasi. Kemudian, kompoenen tutur berfungsi sebagai pedoman untuk melihat variasi bentuk dan makna komunikasi. Komponen-komponen tutur mencakup; *setting and scene, participants, ends, act sequence, key, norms of interaction and interpretation*, dan *genre* (periksa: Hymes, 1974:53-62; Wardhaugh, 1986:238-240; dan Duranti, 2000:288).

- 1). *Setting (latar)* mengacu kepada tempat dan waktu, yakni situasi-situasi konkrit dimana komunikasi berlangsung; sementara *scene* merujuk kepada latar psikologis.
- 2). *Participants (partisipan)* mengacu kepada peserta tutur (P dan T) yang terlibat dalam proses komunikasi. Biasanya, partisipan mempunyai status dan peran sosial tertentu.

- 3). *Ends (akhir atau tujuan tutur)* merupakan faktor yang berpengaruh terhadap representasi kekuasaan untuk mewujudkan tujuan tutur. Secara konvensional, tujuan merujuk kepada hasil-hasil yang diketahui atau diperkirakan dari sebuah komunikasi dan tujuan-tujuan pribadi.
- 4). *Act sequences (rangkaian tindakan)* merujuk kepada bentuk dan isi atau topik tuturan. Topik mengacu pada bentuk dan isi dari apa yang dituturkan (persepasinya, kata-kata yang dipakai, bagaimana kata-kata itu dipakai, dan hubungan apa yang disampaikan dengan topik sebenarnya).
- 5). *Key (kunci)* mengacu kepada nada, sikap, atau semangat yang dibawa oleh pesan tertentu. Kunci mungkin ditandai secara nonverbal oleh bermacam-macam perilaku, gerak, isyarat tubuh, atau bahkan kelakuan.
- 6). *Instrumentalities (piranti)* merujuk kepada pilihan saluran komunikasi, misalnya; tulis, lisan, dan bentuk-bentuk tuturan yang aktual digunakan (bahasa, dialek, kode, atau register yang dipilih). Di dalam proses komunikasi, mungkin saja digunakan piranti yang berbeda-beda dalam sebuah percakapan verbal selama jangka waktu tertentu.
- 7). *Norm of interaction and interpretation (norma interaksi dan interpretasi)* merujuk kepada perilaku dan sifat yang melekat pada P dan T, dan bagaimana semuanya dipandang oleh seseorang yang tidak memilikinya.
- 8). *Genre (jenis atau tipe peristiwa)* mengacu kepada kategori, seperti; sajak, teka-teki, kuliah, doa, dan sebagainya.

Situasi, peristiwa, dan komponen tutur merupakan unsur-unsur yang mempengaruhi bentuk, strategi, fungsi, dan representasi kekuasaan dalam berbagai wacana tak terkecuali dalam wacana politik. Di dalam wacana politik, dalam hal ini pihak P terhadap pihak T sebagai mitra tutur di dalam proses interaksinya melalui situasi, peristiwa, dan komponen tutur, akan merepresentasikan sebuah corak kekuasaan menurut eksistensinya. Di dalam konteks DPRD komunikasi dan interaksi yang dimaksud sangat dinamis, sebab iklim politik dewasa ini telah mengalami banyak perubahan. Di dalam kalangan DPRD sendiri dan antara legislatif dengan eksekutif telah terjadi perubahan yang sebelumnya pihak eksekutif tampak selalu mendominasi setiap wacana.

Ditinjau dari segi kewacanaan, maka aktivitas anggota DPRD dalam menjalankan fungsi perwakilannya merupakan sebuah wacana percakapan yang bernuansa politik. Dalam konteks wacana politik anggota DPRD, apakah secara internal sebagai anggota fraksi, anggota komisi yang berinteraksi dengan sesama anggota DPRD lainnya, maupun secara eksternal yang berinteraksi dengan organisasi kepartaiannya atau dengan

pihak eksekutif, cenderung akan menggunakan setting komunikasi yang menunjukkan penggunaan jenis kekuasaan tertentu. Wujud kekuasaan itu dapat diidentifikasi dari satuan dasar wacana politiknya, yakni tindak tutur. Paling tidak ada lima tindak tutur yang digunakan untuk mewujudkan kekuasaan, yakni; tindak tutur asertif, tindak tutur direktif, tindak tutur ekspresif, tindak tutur komisif, dan tindak tutur deklaratif. Melalui kelima tindak tutur itu, anggota DPRD akan mempengaruhi sikap atau perilaku sesamanya atau pihak eksekutif sebagai mitra.

Dari segi kekuasaan, ada lima jenis kekuasaan yang akan diamati di dalam tindak tutur itu, yakni; (1) kekuasaan paksaan, (2) kekuasaan absah, (3) kekuasaan hadiah, dan (4) kekuasaan keahlian, dan (5) kekuasaan atraktif atau acuan. Di dalam mewujudkan kekuasaan tersebut, para penutur akan menggunakan strategi tertentu yang dibangun dari pola-pola percakapan tertentu pula. Untuk itu, strategi kekuasaan dalam hal ini akan teridentifikasi dari giliran tutur dan pengendalian topik pembicaraan di dalam acara-acara persidangan dan acara resmi lainnya yang berlangsung. Terkait dengan fungsi kekuasaan, juga akan terlihat paling tidak tiga perspektif fungsional kekuasaan, yaitu; (1) fungsi prefentif, (2) fungsi suportif, dan (3) fungsi korektif.

Studi ini akan menggunakan tiga komponen tutur untuk melihat representasi kekuasaan dalam wacana politik, yaitu; (1) partisipan, (2) tujuan tutur, dan (3) topik tuturan. Ditinjau dari segi partisipan, representasi kekuasaan akan terkait dengan beberapa hal seperti latar politik (partai), budaya berkomunikasi, jarak dan status sosial, umur, dan mungkin juga jender. Dari segi tujuan tutur, representasi kekuasaan akan terkait dengan tujuan-tujuan institusional (legislatif, eksekutif, komisi, fraksi, serta partai) dan tujuan personal bagi masing-masing anggota DPRD sebagai individu dalam proses komunikasi verbal. Kemudian dari segi topik tuturan, representasi kekuasaan terkait dengan topik agenda persidangan dan nonpersidangan.

IV. Konseptualisasi

Agar diperoleh pemahaman yang bersifat operasional terhadap beberapa istilah pokok yang digunakan, dan untuk memberi arah yang jelas bagi penelitian ini, maka beberapa istilah pokok tersebut akan dikonsepsikan sebagai berikut:

- a. *Kekuasaan* adalah pengaruh potensial yang dimiliki oleh seluruh anggota DPRD pada saat berinteraksi dalam wacana politik di lingkungan kerjanya.

- b. *Wacana politik* adalah wacana kontekstual yang berbentuk percakapan dalam acara-acara resmi di DPRD
- c. *Representasi kekuasaan* adalah manifestasi bentuk, strategi, dan fungsi kekuasaan anggota DPRD dalam tindak tutur asertif, direktif, ekspresif, komisif, dan deklaratif pada saat berkomunikasi dalam proses politik secara kontekstual.
- d. *Tindak tutur asertif* adalah ilokusi untuk menyatakan suatu kebenaran dimana penutur terikat pada kebenaran proposisi yang diungkapkan.
- e. *Tindak tutur direktif* adalah ilokusi yang dirancang untuk menggiring petutur agar melakukan suatu tindakan.
- f. *Tindak tutur ekspresif* adalah ilokusi yang menyatakan sikap dan pesan penutur terhadap suatu keadaan.
- g. *Tindak tutur komisif* adalah ilokusi yang fungsinya sebagai janji penutur untuk melakukan sesuatu yang menyenangkan karena berorientasi pada kepentingan petutur.
- h. *Tindak tutur deklaratif* adalah ilokusi yang jika diucapkan akan menyebabkan terjadinya suatu kondisi baru atau menyebabkan perubahan-perubahan fakta melalui pelaksanaannya.
- i. *Bentuk kekuasaan* adalah satuan pragmatik direktif, ekspresif, komisif, dan deklaratif yang merepresentasikan kekuasaan anggota DPRD ketika berkomunikasi dalam wacana politik.
- j. *Strategi kekuasaan* adalah cara-cara yang digunakan oleh anggota DPRD untuk *mewujudkan* kekuasaannya pada saat berkomunikasi dan berinteraksi dalam wacana politik.
- k. *Fungsi kekuasaan* adalah tautan aspek praksis prefentif, suportif, dan korektif kekuasaan dalam konteks proses dalam wacana politik di DPRD.

VI. Kesimpulan

Tindak tutur dalam wacana politik merupakan sarana komunikasi untuk merepresentasikan kekuasaan oleh satu atau beberapa orang sebagai penutur. Bentuk-bentuk kekuasaan yang diwujudkan oleh politisi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai wakil rakyat yang mencerminkan kehidupan demokrasi dalam suatu wilayah politik tertentu. Studi etnografi komunikasi tentang kekuasaan dalam wacana politik di DPRD Kota Palu ini, tidak berlatar pada asumsi terjadinya kekesenjangan antara harapan dan kenyataan politik yang terjadi. Studi ini mengkaji proses komunikasi yang merepresentasikan kekuasaan dalam wacana politik, sehingga lebih cenderung berperspektif sosiopolitikolinguistik

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, Benedict. R. 1990. *Language and Power: Exploring Political Culture in Indonesia*. Ithaca: Cornell University Press.
- Austin. J.L. 1978. *How to Do Thing with Words*. Cambridge: Harvard University Press.
- Bogdan, Robert C. dan Biklen, Sari Knopp. 1982. *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*. Boston: Allyn and Bacon, Inc.
- Brown, Gillian dan Yule, George. 1996. *Analisis Wacana*. Terjemahan I. Sutikno. Jakarta:Gramedia.
- Duranti, Allesandro. 2000. *Linguistic Antrophology*. Cambridge: University Press.
- Gibson, James dkk. 1996. *Organisasi: Perilaku, Struktur, Proses*. Terjemahan Ninik Adiarini. Jakarta: Binarupa Aksara.
- Hatch, Evelyn. 1992. *Discourse and Language Education*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hodge, R. & G. Kress. 1979. *Language as Ideology*, London: Routledge & Regan Paul.
- Hymes, Dell. 1974. *Foundation in Sociolinguistics: An Etnographic Approach*. Philadelphia: University of Pennsylvan Press, Inc.
- Ibrahim, Abd. Syukur. 1993. *Kajian Tindak Tutur*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Ibrahim, Abd. Syukur. 1994. *Panduan Penelitian Etnografi*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Ibrahim, Abd. Syukur. 1996. *Bentuk Direktif Bahasa Indonesia*. Disertasi, Tidak Diterbitkan. Surabaya: Program Pascasarjana Universitas Airlangga.
- Kuntarto, Eko. 1999. *Strategi Kesantunan Dwibahasawan Indonesia-Jawa: Kajian Wacana Lisan Bahasa Indonesia*. Disertasi (Tidak Diterbitkan), Malang: PPS IKIP Malang.
- Lee, Blaine. 2002. *Prinsip Kekuasaan*. Terjemahan Arvin Saputra. Jakarta: Binarupa Aksara.
- Leech, Geoffry. 1996. *Prinsip-prinsip Pragmatik*. Terjemahan M.D.D. Oka. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Levinson, Stephen C. 1985. *Pragmatis*. Cambridge: Cambridge University Press
- Littlejohn, Stephen. 1992. *Theories of Human Communication*. California: Wadsworth Publishing Company.
- Miles, Matthew B. dan Huberman, A. Michael. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Parera, D.J. 1983. *Bahasa Indonesia dan Bahasa Daerah Dilihat Dari Segi Sosiopolitikolinguistik*, Makalah dalam: Kongres Bahasa IV, Jakarta: Departemen P&K.
- Richard, Jack C. 1995. *Tentang Percakapan*. Trjemahan Ismari. Surabaya: Airlangga University Press.
- Schiffrin, Deborah. 1994. *Approaches to Discourse*. Oxford: Blackwell.
- Searle, John R. 1969. *Speech Acts: An Essay in the Philosophy of Language*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Searle, John R. 1975. *Indirect Speech Acts*. Dalam Peter Cole dan Jerry L. Morgan. (Eds). *Syntax and Semantic Volume 3: Speech Acts*. New York:Academic Press.

- Spradley, J.P. 1980. *Participant Observation*. New York: Holt, Rinehart, and Winston.
- Stone, Clarence. 1986. *Power and Social Complexity*. Dalam: Robert J. Watse (Ed). *Community Power: Direction For Future Research*. Newbury Park, London: Sage Publication
- Sutopo, HB. 1998. *Penelitian Kualitatif, Sebuah Pendekatan Interpretatif Bagi Pengkajian Proses dan Makna Antar Subjek*, Surakarta
- Thansoulas, Dimitros. 2001. *Language and Power in Education*. <http://www.developing teacher.com/article training/power1 dimitrios.html>.
- Wardhaugh, Ronald. 1986. *Introduction to Sociolinguistics*. Oxford: Basil Blackwell ltd.
- Yulk, Gery A. 1994. *Kepemimpinan Dalam Organisasi*. Terjemahan Jusuf Udaya. Jakarta: Prenhallindo.